

**PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DI KELURAHAN PENEKI KECAMATAN TAKKALALLA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAJO**

OLEH :

AND: BASO SUTANSO

UNIVERSITAS

BOSOWA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45"**

1991

PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DI KELURAHAN PENEKI KECAMATAN TAKKALALLA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAJO

OLEH

ANDI BASO SUTANSO

BOSOWA

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk
menempuh ujian sarjana ilmu Administrasi Negara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS "45"

1991

HALAMAN PERSETUJUAN

Pada hari ini tanggal 20 bulan 8 tahun 1991

Skripsi dengan judul : PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA DIKELURAHAN PENEKI KECAMATAN TAKKLALLA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II WAJO .

Nama : Andi Baso Sutanso

Nomor Stb/Nirm : 4586020254/871133292

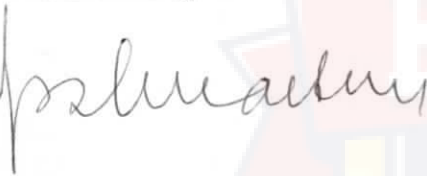
Jurusan : Administrasi Negara.

Disetujui untuk diujikan pada tanggal 31 Agustus 1991

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. PS. Rahim, MS

Drs. Faried Ali SH, MS

Mentetujui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas "45"
Ujung Pandang

Ketua Jurusan Adminis-
trasi Negara Universi-
tas "45" Ujung Pandang



Drs. H. MUHAMMAD THALA

Drs. GUNTUR KARNAINI

HALAMAN PENERIMAAN

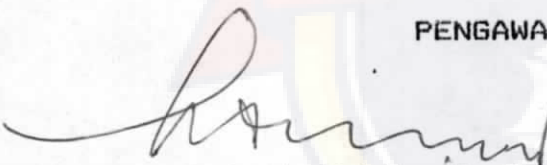
Pada hari ini tanggal 30 bulan 8 tahun 1991

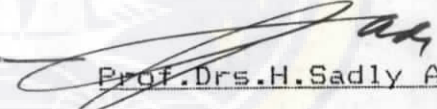
Skripsi dengan judul : PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA DI KELURAHAN PENEKI KECA-
MATAN TAKKALALLA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II WAJO

Nama : Andi Baso Sutanto
Nomor Stb/Nirm : 4586020254/871133292
Jurusan : Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung
Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelas Sarjana Negara pada Jurusan Administrasi Negara
Program S-1

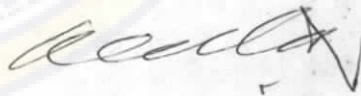
PENGAWAS UMUM


Prof. Mr. Dr. Zainal Abidin Farid


Prof. Drs. H. Sadly AD.MPA.


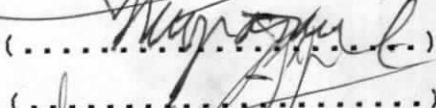
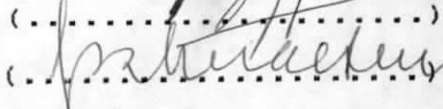

PANITIA UJIAN


Drs. H. Muhammad Thala


Drs. Guntur Karnaeni

TIM PENGUJI

1. Drs. H. Muhammad Thala
2. Drs. S. Belopadang, MS
3. Drs. La, Nafie, M. Ed. ADM
4. Drs. H. PS. Rahim, MS


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyanyang, sekaligus memohon pertolongan dan taufiq dari padanya, sehingga penulis dapat mewujudkan sebuah skripsi yang berjudul : FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KELURAHAN PENEKI KECAMATAN TAKALALLA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAJO.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas " 45 ".

Pada kesempatan ini penulis dengan penuh kerelaan hati menghanturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Drs. H.PS. Rahim dan Bapak Drs.Faried Ali,SH.,MS selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan tesis ini hingga selesai.

Sesungguhnya daya upaya yang maksimal disertai rasa kesabaran dan ketekunan penulis dalam usaha menyusun guna untuk menyelesaikan skripsi tampaknya belum cukup, karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki penulis, sehingga segala kekurangan, kekeliruan dan ketidak sempurnaan mungkin saja dapat ditemui dalam skripsi ini.

Untuk mengatasi kesemuanya itu penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga wajarlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Andi Zainal Abidin Farid, SH. sebagai Rektor Universitas "45".
2. Bapak Drs.H.M. Thala, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".
3. Bapak Drs.Guntus Karnaini Selaku PD I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".
4. Bapak Drs. H. Sadly AD,MPA selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Politik Universitas "45".
5. Bapak Drs.H.PS. Rahim dan Bapak Drs.Faried Ali SH selaku pembimbing, yang ikhlas dan keterbukaan beliau dalam memberikan bimbingan dan petunjuk yang sangat berguna umlai dari awal sampai selesainya skripsi ini.
6. Bapak Drs. Andi Madjja ZA selaku Kepala Kantor Sosial Politik kabupaten Daerah Tingkat II Wajo.
7. Bapak DR.Ir.Radi A. Gani selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wajo.
8. Kepada Ayahanda Andi Lembang dan Ibunda H. Djuhra sebagai orang tua penulis yang dengan penuh ketakwaan dan kasih sayang mendidik, membina, membesarkan dan membiayai penulis hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan Study di Universitas "45".
9. Kepada Seluruh pihak keluarga penulis yang telah memberikan dorongan sehingga tiba akhir penyusun Skripsi ini.
10. Kepada rekan-rekan dan sahabat penulis Andi Asri, Andi Bustan dan Ambo Dalle yang telah memberikan

motivasi dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

11. Kepada semua staf karyawan , keryawati serta rekan-rekan mahasiswa Universitas "45" khususnya Fakultas Sospol yang pada umumnya serta bapak / ibu dosen yang telah membantu penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas "45".

Sebagai kata terakhir penulis , semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik terhadap diri maupun terhadap masyarakat, nusa dan bangsa pencaipaian tujuan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT

Ujung Pandang.....

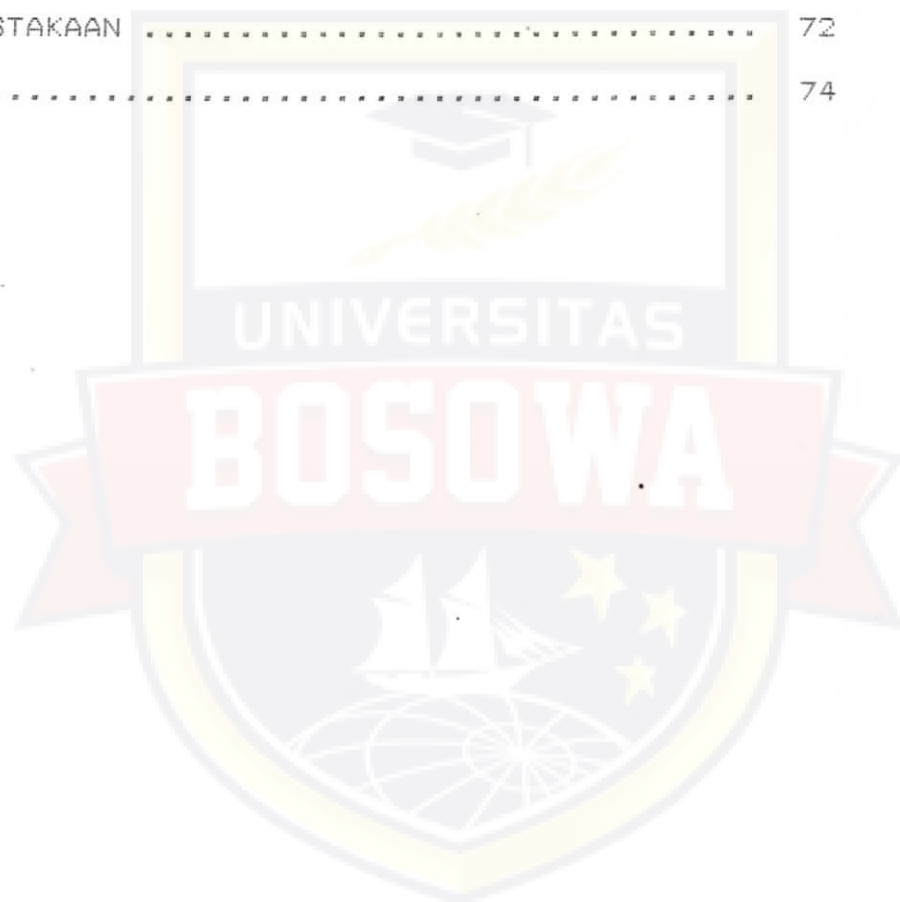
PENULIS,

(Andi Baso Sutanso)
STB 45 86 020 254

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah ..	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..	5
D. Kerangka Pemikiran	6
E. Metode Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PURTAKA	11
A. Batasan Pengertian	11
B. Landasan Pembangunan	17
C. Sasaran Pembangunan	23
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	28
A. Keadaan Geografis	28
B. Keadaan Penduduk	30
C. Keadaan Perekonomian / Sosial ...	35
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Proses Perencanaan Pembangunan Desa di Kelurahan Peneki	48
B. Rencana Pembangunan Yang ditetapkan Oleh Badan Perencanaan Desa (LKMD) ...	52

	C. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Desa	62
	D. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Peneki Kecamatan Takkalalia ...	67
BAB	V : KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran - Saran	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN	72
LAMPIRAN	74



DAFTAR TABEL

TABEL I	Tingkat Perkembangan Penduduk Kelurahan Peneki.....	33
TABEL II	Jumlah Prasarana Sekolah di Kelurahan Peneki Tahun 1990-1991	43
TABEL III	Tingkat Pendidikan Penduduk Masing-Masing Lingkungan di Kelurahan Peneki Tahun 1990	44
TABEL IV	Jumlah Guru di Kelurahan Peneki.....	44
TABEL V	Komposisi Penduduk Menurut Agama di Kelurahan Peneki Tahun 1991.....	46
TABEL VI	Jumlah Dan Jenis Tempat Ibadah di Kelurahan Peneki	47
TABEL VII	Keikut sertaan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pembangunan Dari Kegiatan Perencanaan Sampai Evaluasi.....	49
TABEL VIII	Keikut sertaan Anggota LKMD Dalam Penentuan Arah Pembangunan.....	50
TABEL IX	Keikut sertaan masyarakat Dalam Memikul Beban Dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Pembangunan.....	51
TABEL X	Tanggapan Responden Tentang Keterbukaan Kepala Kelurahan Peneki Memimpin LKMD..	53
TABEL XI	Daftar Usulan Proyek-Proyek Di Kelurahan Peneki Tahun 1991-1992	57



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dapat disadari bahwa dewasa ini kita sedang berada dalam era pembangunan nasional dan oleh sebab itu setiap aktivitas harus disesuaikan dengan derap langkah pembangunan tersebut. Setiap pembangunan berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan ke arah yang lebih baik oleh karena itu perlu adanya suatu perencanaan yang mantap dalam menjamin keberhasilan tersebut.

Hal semacam ini merupakan langkah pertama dalam suatu usaha pembangunan sebab pembangunan tanpa adanya perencanaan maka kemungkinan besar akan mengalami kegagalan-kegagalan yang tidak diinginkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut sering terdengar anjuran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengusahakan agar supaya masyarakat lebih berpartisipasi dalam pembangunan, adalah suatu usaha pendayagunaan daya dan dana dan tenaga yang terkandung dalam masyarakat itu sendiri.

Dana, tenaga dan daya tersebut diproses dan diarahkan kepada usaha pembangunan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan proyek-proyek pemerintah, baik dalam bentuk bantuan pembangunan dari pusat yang diberikan kepada daerah dan desa maupun atas inisiatif

dari masyarakat itu sendiri yang berbentuk swadaya masyarakat. Oleh sebab itu pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk membangun prasarana berdasarkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), sedangkan masyarakat berkewajiban untuk membangun berdasarkan swadaya. Karena masyarakat pada umumnya tinggal di daerah pedesaan maka obyek dari pembangunan itu berorientasi pada pembangunan pedesaan.

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN Tahun 1987) dicantumkan bahwa:

"Perhatian sebesar-besarnya perlu diberikan peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui peningkatan prakarsa swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana pembangunan pedesaan, seperti bantuan-bantuan Inpres dan sebagainya."

Jadi dengan apa yang telah dicantumkan di atas maka berhasilnya pembangunan sangat ditentukan adanya korelasi antara kemampuan tersebut dalam usaha pembangunan yang ditargetkan sebelumnya dapat dipenuhi.

Dari permasalahan-permasalahan yang diuraikan di atas maka jelaslah bahwa aspek perencanaan adalah sangat penting artinya merupakan inti di dalam pelaksanaan pembangunan, demi untuk terciptanya suatu perkembangan dan perubahan sehingga kelak masyarakat dapat mampu

membangun atau giat berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran bangsanya.

Begitu pula negara Republik Indonesia yang senantiasa berorientasi kepada terwujudnya masyarakat adil makmur materil maupun sprituil yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak ketinggalan dari proses pembangunan tersebut.

Untuk mencapai tujuan di atas diharapkan atau dibutuhkan adanya perencanaan yang mantap sesuai dengan Ideologi Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian pentingnya perencanaan dalam pembangunan Negara Republik Indonesia yang pada khususnya pembangunan Desa di Kelurahan Peneki Kecamatan Takkalalla . Adalah masalah yang tidak kurang pentingnya bahkan hal yang turut menentukan berhasil tidaknya usaha untuk mencapai cita-cita bangsa kita yaitu bangsa Indonesia.

Jadi suatu negara yang baru berkembang ataukah Negara yang telah maju tidak terlepas dari perencanaan, sebab perencanaan yang menjadi patokan dalam rangka pelaksanaan pembangunan disegala bidang, apakah itu pembangunan materil maupun pembangunan mental sprituil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perencanaan desa yang terjadi di Kelurahan Peneki.
2. Pembangunan apa saja yang ditetapkan oleh badan perencanaan yang terlaksana di Kelurahan Peneki.
3. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Peneki Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Permasalahan yang telah disebutkan di atas akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses perencanaan desa yang berlangsung di Kelurahan Peneki.
- b. Untuk mengetahui pembangunan yang terlaksana yang ditetapkan oleh badan perencanaan di Kelurahan Peneki.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perencanaan desa.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan akan hasil penelitian ini adalah :

- a. Study ini diharapkan dapat dilihat sampai seberapa jauh peranan perencanaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam masyarakat sebagai bahan untuk lebih meningkatkan pembangunan desa pada

lainnya ke Kelurahan Patiya pada khususnya.

- a. Dari sisi penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat sebagai bahan untuk lebih meningkatkan pembangunan desa di Kecamatan Takkalalla.
- b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi kepada pihak-pihak yang berwenang, khususnya pemerintah wilayah kecamatan Takalalla. Dalam memantapkan proses perencanaan pembangunan demi terciptanya pemerataan pembangunan menuju masyarakat adil makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

D. Kerangka Pemikiran

Penyusunan rencana Pembangunan desa dilakukan berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah. Melalui prinsip ini aspirasi warga dan kebutuhannya dapat tertampung sebab warga desa bukan saja sebagai obyek pembangunan tetapi yang terpenting dalam mendewasakan warga desa adalah kedudukannya sebagai obyek pembangunan. Hal ini sesuai pula dengan prinsip demokrasi, bahwa pembangunan yang dilaksanakan bersumber dari rakyat untuk rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Drs I. Nyoman Beratha dalam bukunya yang berjudul Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa mengemukakan sebagai

berikut :

"Bahwa perencanaan Pembangunan Desa sebenarnya suatu proses/siklus kegiatan pengolahan yang dinamis dalam penentuan sasaran-sasaran /obyek yang akan dicapai dengan cara penentuan jalan yang setepat-tepatnya yang akan dipakai untuk mencapai sasaran. Kemudian diikuti dengan pengalokasian dana dan daya yang ada di desa, pewadahan organisasinya, penentuan ruang dan waktu, akhirnya adanya penilaian (evaluasi) terhadap hasil-hasil usaha untuk penentuan langkah-langkah berikutnya".

11

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.4

Tahun 1981, tentang Mekanisme Pengendalian Program Desa, dimana Mekanisme diatur sebagai berikut :

1. Rencana/usul proyek dalam rangka pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan disusun oleh LKMD, dengan bimbingan dari Camat dengan bantuan oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan. Rencana/usulan proyek tersebut disiapkan dari bahan-bahan usul perencanaan yang diajukan LKMD yang bersangkutan, diajukan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan kepada Camat.
2. Semua rencana/usulan proyek dari desa /kelurahan yang telah diterima oleh Camat, kemudiandibahas bersama dengan instansi yang ada di tingkat Kecamatan melalui Diskusi UDKP dan Temu Karya LKMD tingkat Kecamatan dan dapat dilengkapi pembahasannya dalam forum koordinasi lainnya dengan bimbingan Ketua

BAPPEDA Tingkat II dan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten /Kotamadya.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini jelas terlihat bahwa penyusunan terhadap pembangunan desa dilakukan oleh LKMD untuk diteruskan atau disampaikan kepada Pemerintah. Hal ini sesuai dengan tugas pokok LKMD yang diatur dalam Kepres RI.No. 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dimana dalam keputusan Presiden ini dinyatakan bahwa LKMD

bertugas membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam :

1. Merencanakan Pembangunan yang didasarkan atas azas Musyawarah.
2. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari pelbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat.
3. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di Desa dan Kelurahan.

E. Metode Penelitian

Seperti lazimnya dalam setiap penulisan suatu kerja ilmiah untuk mendukung obyektivitas dan kebenaran yang diungkapkan memerlukan data yang cukup dan relevan setiap data yang diperlukan itu memiliki sifat dan sumber

yang berbeda sehingga untuk memperolehnya memerlukan metode tertentu pula.

Adapun metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini masih merupakan taraf penelitian deskriptif, guna mendapat gambaran yang cermat dari obyek permasalahan dengan maksud mengetahui pelaksanaan perencanaan pembangunan desa guna pengembangan desa di Kecamatan Takkalalla, dari sampel lokasi dan pendapat responden.

Selanjutnya taraf penelitian deskriptif ini dilakukan 2 (dua) cara yaitu :

1. Study pustaka, ialah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, majalah, artikel dan peraturan-peraturan serta bahan-bahan tertulis yang erat hubungannya dengan materi ini tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh landasan teori yang akan digunakan pada pembahasan .
2. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara penelitian langsung pada obyek yang diteliti penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data/informasi secara langsung pada sumbernya.

Teknik Pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

1. Observasi (pengamatan) yaitu melakukan pengamatan langsung pada kenyataan yang ada dilapangan pengamatan yang cermat memungkinkan memperoleh fakta yang lengkap, terutama hasil yang telah dicapai.
2. Interview (wawancara) yaitu penulis mengadakan tanya jawab langsung kepada aparat kecamatan , Kelurahan serta tokoh/ pemuka masyarakat Kelurahan Peneki yang kaitannya dengan penelitian ini seperti :
 - a. Aparat Kecamatan Bahagian Bagdes (1 orang)
 - b. Kepala Kelurahan Peneki (1 orang)
 - c. Sekretaris Desa Peneki (1 orang)
 - d. Para Kepala Dusun (4 orang)
 - e. Ketua dan Sekretaris LKMD (2 orang)Kesemuanya dipandang sebagai informan, sedang responden ditunjukan kepada anggota masyarakat yang berjumlah 10 orang. Sehingga dengan demikian semuanya berjumlah 19 orang.

Kesemuanya ini adalah orang yang berkecimpun dalam persoalan yang hendak diteliti untuk memberikan keterangan yang diperlukan yang ada sangkut pautnya dengan materi pembahasan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Batasan Pengertian

Sebelum penulis membahas isi/materi ini maka penulis lebih dahulu memberikan pengertian-pengertian, karena sesuatu masalah yang ingin diuraikan tanpa mengetahui pokok persoalannya, sedikit banyaknya akan mendapatkan kesulitan-kesulitan atau kekaburan di dalam pembahasannya.

Dengan titik tolak dalam skripsi ini maka ada beberapa hal yang perlu penjelasan dan yang pertama-tama penulis kemukakan yaitu :

1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah suatu gerak langka yang pertama dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan pembangunan dan merupakan pandangan langka apa yang kita akan laksanakan itu sesuai dengan pendapat bapak Widjojo Nitisastro bahwa :

Perencanaan ini pada dasarnya berkisar pada dua hal yaitu :

- a. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
- b. Pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut baik untuk penentuan tujuan-tujuan tersebut baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu maupun bagi pemilihan cara-

cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu dipilih pula".)

Kemudian Albert Weterson menyebutkan Perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.
- b. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu kegiatan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.
- c. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efisien dan efektif.
- d. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang dilaksanakan, bagaimana dan oleh siapa.
- e. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output) dengan sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.

Dengan demikian perencanaan itu adalah tahap awal di dalam melaksanakan kegiatan pada umumnya, terutama

yang berkenaan dengan bidang pembangunan. Oleh karena itu kecendrungan utama adalah bahwa ilmu perencanaan yang berkembang paling maju adalah perencanaan pembangunan disegala bidang, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang seperti Negara Republik Indonesia yang kita cintai.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan mengenai pengertian pembangunan, yang mana pembangunan itu bersifat ke arah perubahan, suatu gerak langka menuju tujuan yang dapat dilibatkan sebagai suatu kemajuan dalam rangka pembangunan atau merupakan pertumbuhan serta perkembangan menuju ke negara modern.

2. Pengertian Pembangunan

Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian pembangunan yaitu :

a. Menurut S.P Siagian, MPA bahwa :

"Pembangunan sebagai suatu kesatuan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana berlaku secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa".)

b. Prof.DR.Bintoro mengemukakan pada tentang pengertian pembangunan sebagai berikut :

Pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya.

Dengan adanya pengertian pembangunan seperti telah dikemukakan di atas, maka ini berarti bahwa

pembangunan itu tidak mungkin dijalankan hanya secara perorangan saja, tetapi harus diikuti sertakan beberapa orang sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Selanjutnya dengan memahami pendapat tersebut, pengertian pembangunan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pembangunan adalah suatu proses yang terus menerus dilaksanakan.
- b. Pembangunan dilaksanakan secara berencana dimana perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
- c. Pembangunan mengimpelisir modernisasi yang bersifat demokrasional.

Dengan demikian jelas bahwa pelaksanaan pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

3. Pengertian Desa

Desa yang kita kenal sekarang ini sebenarnya telah dikenal zaman dahulu. Sekarang ini selain istilah Desa dikenal juga istilah Kelurahan. Hal ini sesuai dengan perkembangan sejarah di Indonesia yang telah berlangsung berabad-abad lamanya, silih berganti timbul dan lenyap nama tersebut dalam prosesnya masing-masing daerah yang memakainya, ini disebabkan



oleh karena adanya kekuasaan politik yang meliputi sebagai wilayah Indonesia.

Beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli, menurut Sutarjo Kartohadikusumo mengutip pendapatnya yang menyatakan yang dimaksud bertempat tinggal suatu masyarakat berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

a. Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan

Desa :

"Desa adalah merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ")

b. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut

Undang- Undang No 5 Tahun 1979 mengemukakan bahwa :

"Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan yang terendah di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. ")

c. Pengertian Desa dapat ditinjau dari beberapa segi

antara lain :

- " - Segi administrasi Pemerintahan, Desa adalah suatu wilayah yang berada dibawah Camat.
- Segi hukum, Desa adalah suatu kesatuan hukum bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
- Segi geografis, Desa adalah suatu daerah yang merupakan tempat/ kemudian penduduk yang bersifat agraris yang sebagian besar atau penuhnya terosilir dari kota. ")

Oleh Karena itu sifat keaneka ragaman masyarakat dan Bangsa Indonsia menurut kenyataannya dan terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama di masing-masing wilayah.

Jadi Desa merupakan susunan yang nyata dan hidup dari masyarakat Desa, inilah merupakan tempat pertahanan rakyat dalam rangka menghadapi serta mempertahankan kemajuan dan kemerdekaan bangsanya, olehnya itu Desa adalah penting artinya bagi rakyat semesta yang mana desa itu adalah tempat mempersiapkan dirinya dalam menghadapi dan mempertahankan hidupnya.

4. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan Pedesaan adalah merupakan tindakan masyarakat dalam rangka menuju kepada perubahan dan pertumbuhan sehingga dari tujuan pada suatu bangsa dapat tercapai sebagaimana yang telah digariskan mengenai pembangunan desa adalah beberapa pendapat ;

a. Menurut E.A. Mokodompit mengemukakan bahwa ;

"Pembangunan Desa adalah usaha swadaya masyarakat yang disadari masyarakat setempat yang disusun menurut tahapan rencana disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat yang bersifat massal integral serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. ")

b. Dalam pola dasar dan gerak operasional FMD adalah ;

"Pembangunan masyarakat Desa (FMD) tidak lain adalah suatu pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintahan yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus sistimatis dan terarah sebagai usaha menyeluruh. ")

Dengan demikian, maka kedudukan desa dalam pembangunan memang amat penting karena sebahagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan sehingga program kebijaksanaan pemerintahan disusun secara khusus yang ditujukan bagi pembangunan pedesaan.

B. Landasan Pembangunan Desa

Pembangunan Desa yang organik terhadap pembangunan daerah, tidak dapat dan tidak haruslah berpola pada pembangunan daerah, demikian pula seterusnya pembangunan daerah organik terhadap pembangunan nasional.

Berkaitan dengan pembangunan daerah, dalam pola umum Pelita IV angka 12 ditetapkan sebagai berikut ;

- a. Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah benar-benar sesuai dengan potensi dengan prioritas daerah, sedang keseluruhan pembangunan daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan, dengan terbinanya Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan di dalam mewujudkan tujuan Nasional.
- b. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih merata di seluruh tanah air diusahakan keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan di dalam masing-masing daerah. Untuk itu perlu ditingkatkan kelancaran

perhubungan baik disatu daerah atau pulau maupun antar daerah dan antar pulau. Khususnya perlu diberikan perhatian yang lebih besar kepada pembangunan daerah-daerah yang relatif terkebelakang, daerah perbatasan. Di samping itu perhatian perlu tetap diberikan kepada daerah-daerah minus dan daerah padat penduduk antara lain untuk mengurangi arus perpindahan penduduk ke kota-kota besar. Dalam rangka itu perlu makin ditingkatkan kemampuan aparat perencanaan di daerah-daerah.

c. Untuk melaksanakan peningkatan pembangunan daerah diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi rakyat di daerah, di samping itu dengan memperhatikan kemampuan daerah, perlu ditingkatkan pendapatan daerah baik dalam pengumuman yang intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada maupun dengan penggalan sumber-sumber keuangan yang baru, yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka ini kemampuan serta perbaikan aparatur pemerintah di daerah perlu terus ditingkatkan baik aparatur otonomi daerah secara lebih nyata dan bertanggung jawab.

d. Dalam melaksanakan pembangunan masing-masing daerah perlu lebih meningkatkan kesadaran dan kemampuan

- penduduk untuk memanfaatkan serta memelihara kelestarian berbagai sumber alam, mengatasi berbagai masalah yang mendesak dan membina lingkungan pemukiman yang sehat. Untuk itu perlu ditingkatkan keterampilan penduduk.
- e. Koordinasi fungsional pemerintah wilayah kerjasama dalam pembangunan antar daerah perlu lebih ditingkatkan untuk lebih melancarkan dan pengelolaan kegiatan pembangunan.
- f. Perhatian sebesar-besarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun yang tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan, seperti bantuan-bantuan Inpres dan sebagainya.
- g. Pembangunan perkotaan perlu dilakukan secara berencana dengan lebih memperhatikan keserasian hubungan antar kota dengan lingkungan dan antar kota dengan daerah pedesaan sekitarnya, serta keserasian pertumbuhan kota itu sendiri.
- h. Dalam rangka peningkatan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan administrasi pemerintahan daerah, maka untuk daerah-daerah tertentu perlu ditata kembali batas-batas administrasi

penyusunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan suatu kenarusan lahirnya pada masyarakat pedesaan jika ingin melakukan perubahan dan pembaharuan melalui pembangunan berencana. Untuk itu perlu adanya sebuah wadah organisasi yang menghimpun dan menyalurkan secara terarah gagasan-gagasan segala sesuatunya yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Organisasi itu ialah misalnya diberi nama-nama lembaga pengembangan swadaya Masyarakat (LPSM).

Swadaya (autoactiviteit) ini adalah merupakan motor penggerak kelompok masyarakat desa. Swadaya bertujuan menciptakan kemandirian pembangunan. Oleh sebab itu parakarsa untuk berswadaya ikhtiar yang pertama ialah menyadarkan dan menanamkan kepercayaan akan kekuatan yang terpendam dalam diri pribadi setiap warga masyarakat desa.

Bagaimana cara membina swadaya itu, menurut Bambang Ismawan adalah melalui proses dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap penggalan atau penggugahan minat (motivasi) dan proses penyadaran kelompok.
2. Tahap pembentukan organisasi dan pemahaman prinsip-prinsip kerjasama.
3. Tahap konsolidasi dan stabilitasi organisasi

selalu berorientasi pragmatis/ mengutamakan mana yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

C. Sasaran Pembangunan

Perencanaan adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang, perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan hakekat pengertian pembangunan desa yaitu perencanaan pembangunan "dari, oleh untuk" masyarakat desa. Desa adalah subyek pembangunan, namun dalam pelaksanaannya masih perlu bimbingan dan bantuan pemerintah lebih atas, melalui proses ini maka keinginan-keinginan dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat desa dapat disalurkan.

Dalam penentuan sasaran pembangunan desa oleh :

1. Rencana Pendahuluan - Yaitu suatu rencana yang Desa (*Rural out Plane*) memuat garis-garis besar rencana induk, merupakan petunjuk tata ruang kerja serta peruntukan tanah (rumah, irigasi, pusat lingkungan dsb.)
2. Rencana Induk Desa - Yaitu suatu rencana yang (*RID*) memuat beberapa hal pokok yaitu :
 - a. Berupa suatu batas-batas

perutukan tertentu

- b. Berupa ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang memberi petunjuk tertentu cara-cara pelaksanaan peruntukan.

3. Rencana Terperinci Desa (RTD) - Yaitu suatu rencana yang merupakan pengisian rencana induk desa berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasional, rencana mana harus mendapat dukungan lembaga musyawarah desa serta mendapatkan pengesahan Bupati Kepala Daerah Tingkat II bersangkutan.
4. Rencana Khusus Desa (RKD) - Yaitu merupakan rencana pengisian suatu RTD, rencana dari suatu bagian dari suatu lingkungan kecil Desa atau sebagai dari keseluruhan Desa terutama yang menyangkut suatu komponen kegiatan fungsional tertentu.

2. Struktur tata ruang kegiatan utama.

Struktur tata ruang utama adalah menyangkut beberapa hal diantaranya; pengaturan penempatan fasilitas-fasilitas dan pengaturan perumahan pada pusat desa yang disesuaikan dengan lokasinya (tepi jalan utama, tepi sungai, tepi danau, tepi gunung, tengah lahan pertanian)

3. Jaringan jalan menggambarkan antar kegiatan yang terdapat pada bagian-bagian desa seperti kegiatan ekonomi dll. Begitu pula perlu diatur prasarana perhubungan berupa terminal yang berlokasi di pusat dilingkungan sebuah desa.

Dalam menyusun rencana pembangunan Desa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan dari bawah, maksudnya agar aspirasi rakyat tertampung. justru itu disinilah fungsi dan peranan seperti LMD, LKMD, PKK dan/ atau Lembaga-lembaga lainnya.

Prosedur penyusunan rencana pembangunan desa adalah sebagai berikut ini ;

LKMD sesuai dengan fungsinya sebagai wadah partisipasi masyarakat membantu pemerintah Desa dalam melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan Desa, adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

1. Menghimpun/ menginventarisir masalah yang berkembang dalam masyarakat, gagasan pemecahan masalah, masalah-

masalah yang sangat dibutuhkan penyelesaiannya.

2. Menyusun dan mensistematisasi masalah tersebut dengan urutan (ranking) prioritas.
3. Mendiskusikan (memusyawarahkan) rumusan tersebut yang selanjutnya, hasil musyawarah tersebut di bawah oleh Kepala Desa dalam Musyawarah LMD, untuk dapat ditetapkan keputusan Desa.

Dalam melaksanakan suatu prosedur adalah amat penting diperhatikan, karena sekalipun sesuatu rencana baik jika salah prosedur niscaya akan salah segala-galanya, karena rencana adalah proyeksi tindakan yang akan dilakukan.

Dengan adanya pelaksanaan pembangunan desa yang terencana menurut pola-pola perencanaan pedesaan yang ditentukan Departemen Pekerjaan Umum, migrasi penduduk desa telah dapat dibatasi, sejauh kesempatan kerja tersedia di desa, seperti mendirikan industri perkayuan, penggilingan beras, perbengkelan kecil, pembuatan pengairan dan jalan Desa dsb. Maka sejauh itu angkatan muda di desa tentu mampu bertahan, tidak mungkin akan meninggalkan tempat kelahirannya, meskipun terdapat kekecualian bagi yang akan melanjutkan pendidikan/keahlian di kota-kota terdekat.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Desa dan masyarakat desa di Indonesia merupakan bahagian yang terluas dan terbesar. Sebahagian besar penduduk Indonesia berada dan diam di pedesaan yang merupakan suatu kesatuan hukum dan merupakan kesatuan unik pemerintahan di negeri kita ini, untuk selanjutnya pengertian Desa dalam pembangunan masyarakat desa adalah kesatuan pemerintah yang terendah di bawah Kecamatan.

Jadi desa adalah suatu daerah yang merupakan tempat kediaman penduduk yang bersifat agraris yang sebahagian atau seluruhnya terpisah dari kota.

Desa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- Desa dan masyarakat Desa mempunyai hubungan erat dengan lingkungan alam, hal ini sangat mempengaruhi kehidupan tani.
- Di desa-desa keluarga merupakan kesatuan sosial ekonomi dan kerja ikatan kekeluargaan kuat.
- Proses-proses sosial berjalan lamban, sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum-hukum yang informal.

Kelurahan Peneki adalah Ibukota Kecamatan Takkalalla yang terdiri dari 4 (empat) Lingkungan yang secara geografis terletak mamajang dari Barat ke Timur yang terbatas pada ;

lebih banyak dari sektor pertanian yang tanahnya memungkinkan untuk produksi pada dan palawija.

Sasaran utama pembangunan pertanian ini jelas ditujukan untuk peningkatan pendapatan perkapita petani serta dapat menunjang disegala sektor pembangunan. Dalam hal ini telah ditempuh usaha-usaha meningkatkan hasil usaha pertanian dengan melalui intensifikasi dengan program BIMAS/ INMAS yang dilaksanakan dua kali setahun dan bahkan diadakan limakali dalam dua tahun dengan menyesuaikan dengan keadaan curah hujan juga ditunjang oleh tersedianya fasilitas-fasilitas seperti pompa air, sehingga tampak dari tahun ketahun dimana kenaikan produksi bahan makanan padi dan palawija makin meningkat.

Di samping adanya BIMAS di Kelurahan Peneki juga terdapat adanya sejumlah usaha dimana beberapa kelompok usaha pembaharuan khusus di lapangan pertanian, seperti penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk, cara penanaman padi, pemanfaatan penerangan dan sebagainya. Jadi melihat potensi-potensi pertanian yang ada di Kelurahan Peneki maka Kelurahan Peneki sangat potensial di dalam meningkatkan potensi yang saling menunjang.

B. Keadaan Penduduk

Sebagaimana kita maklumi bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi penyebaran penduduk yang kurang seimbang merupakan faktor yang sangat mempengaruhi hasil-hasil

kerja yang kurang dimanfaatkan atau pendapatan yang terlalu rendah. "

Maka dengan demikian pertumbuhan penduduk yang tinggi terutama oleh tingginya angka kelahiran berarti kebutuhan akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar terutama tenaga kerja umur muda baik di kota maupun di Desa. Hingga jelaslah kiranya bahwa adanya ketidakseimbangan di dalam penyebaran penduduk telah mengakibatkan pemakaian sumber-sumber alam Indonesia kurang optimal.

Kelurahan Peneki adalah Ibukota Kecamatan Takkalalla Kabupaten Dati II Wajo, yang mana Kelurahan ini terdiri atas 4 (empat) buah lingkungan masing-masing yaitu ;

1. Lingkungan I, Wata Peneki
2. Lingkungan II, Sangkuru
3. Lingkungan III, Topai
4. Lingkungan IV, Bocco

Dimana tiap-tiap lingkungan kalau kita lihat keadaan penduduknya, masih jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya, ini berarti menunjukkan bahwa penyebaran penduduk Kelurahan Peneki belum merata sehingga dengan demikian potensi yang ada tidak dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan keadaan penduduk di daerah ini sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel I. Tingkat Perkembangan Penduduk Kelurahan Peneki

No	Lingkungan	Banyaknya Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelami																Jumlah		
		0 S/D 4		5 S/D10		11 S/D16		17 S/D23		24 S/D30		31 S/D40		41 S/D54		55 S/D79			80 keatas	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P
1.	Wata Peneki	31	61	100	115	110	104	105	107	102	106	148	138	30	38	46	58	18	14	1451
2.	Sangkuru	50	56	53	55	64	66	88	94	79	79	128	130	30	18	38	40	8	10	1144
3.	Topai	36	38	75	76	51	51	58	56	53	57	66	58	9	15	36	30	9	9	793
4.	Bocco	45	47	59	62	49	50	48	52	45	55	46	56	10	16	20	26	3	5	694
	Jumlah	182	202	317	338	274	271	299	309	279	297	388	382	89	87	140	154	38	38	4082

Dengan melihat tabel I di atas maka penggolongan umur penduduk hanya dibagi menjadi 6 (enam) bagian yaitu:

1. Penduduk yang berumur (0 - 4 Tahun) : 383 Orang
2. Penduduk yang berumur (5 - 10 Tahun) : 655 Orang
3. Penduduk yang berumur (11 - 16 Tahun) : 545 Orang
4. Penduduk yang berumur (17 - 23 Tahun) : 607 Orang
5. Penduduk yang berumur (24 - 30 Tahun) : 575 Orang
6. Penduduk yang berumur (31 - 40 Tahun) : 770 Orang
7. Penduduk yang berumur (41 - 54 Tahun) : 176 Orang
8. Penduduk yang berumur (55 - 79 Tahun) : 293 Orang

9. Penduduk yang berumur 80 ke atas	: 47 Orang

Jumlah	: 4051 Orang

Sedangkan khusus penduduk yang sudah lanjut usia atau yang berumur 55 tahun ke atas adalah 340 orang dan yang berumur 16 tahun ke bawah 4049 orang, ini kami bedakan diantara jumlah penduduk yang produktif dan jumlah penduduk yang non produktif.

1. Penduduk yang produktif.

- a. Yang berumur 17 - 24 Tahun : 1727 Orang
- b. Yang berumur 25 - 49 Tahun : 1239 Orang

2. Penduduk yang non produktif.

- a. Yang berumur 0 - 16 Tahun : 1583 Orang
- b. Yang berumur 55 ke atas : 340 Orang

Dari sekian banyak penduduk yang ada di Kelurahan Peneki mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda mengenai mata pencahariannya yang dilaksanakan di Kelurahan Peneki dapat dibagi menurut jenis usahanya antara lain :

- 1. Pegawai : 69 Orang
- 2. Pedagang : 56 Orang
- 3. Petani : 677 Orang
- 4. ABRI : 17 Orang
- 5. Pensiunan (FNS & ABRI): 8 Orang

Diantara kelima jenis mata pencaharian tersebut di atas sukar untuk dipisahkan secara jelas sebab mereka itu

dilakukan secara agronomis, sesuai potensi dan strategi alamnya, justru pengembangan perekonomian banyak memperhatikan aktivitas pertanian tanaman pangan pertanian, perhubungan dan perdagangan yang keseluruhannya merupakan rangkaian prasarana yang diperlukan oleh penduduk di kelurahan Paneki kecamatan Takkalalla khususnya penduduk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo pada umumnya mayoritas pertanian.

1. *Pertanian Tanaman Pangan*

Potensi areal sawah di kelurahan Paneki ini kurang lebih 2750 Ha, dimana musim tanamnya dilaksanakan melalui suatu program yang pada suatu acara Tudang Sipulung. Namun demikian pembangunan pertanian di daerah ini melaju untuk membawa petani, penduduk terbesar di daerah ini kepada derajat yang lebih tinggi dan dinamis. Mutu intensifikasi semakin dicapai ditandasi aktivitas petani memadukan Insus sehingga realisasi Inpres No. 30 tahun 1980 mengalami peningkatan.

2. *Peternakan*

Kelurahan Peneki Kecamatan Takkalalla memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ternak. Dengan dasar ini, maka pengembangan perunggasan di daerah ini di arahkan untuk memanfaatkan limbah pertanian.

cukup kaya sebab perhubungan yang sulit menyebabkan biaya pengangkutan tinggi.

Dengan demikian jaringan perhubungan itu merupakan urat nadi yang penting dalam memperlancar perekonomian rakyat, demikian pula dalam pembangunan masyarakat desanya. Jadi untuk lebih terdapatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu adanya perhubungan yang lancar.

Tujuan pembangunan perhubungan seperti ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun kedua bahwa :

"Pembangunan perhubungan antara lain ditujukan agar pertumbuhan yang lebih serasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Demikian pula akan diberikan perhatian khusus kepada daerah terpencil dengan menggunakan angkutan printis di darat, laut dan udara. Jaringan yang diprioritaskan akan diberikan kepada jaringan jalan dan angkutan yang menghubungkan daerah pada desa dengan pusat-pusat pemasaran".

Dengan melihat rumusan di atas, maka berarti pembangunan jalan dan jembatan menjadi amat penting. Oleh karena itu kalau sarana perhubungan itu kurang baik, maka dapat menghambat jalannya pembangunan itu utamanya pada pembangunan masyarakat pedesaan. Jadi pembangunan jaringan-jaringan jalan dan rehabilitasi jalan itu sangat bermanfaat untuk mencapai lalu lintas jarak pendek, jarak menengah maupun jarak panjang.

Adapun yang merupakan alat perhubungan di Kelurahan Peneki Kecamatan Takkalalla dimana dapat menghubungkan

desa-desa dan daerah-daerah disekitarnya maupun daerah-daerah di luar Kabupaten Dati II Wajo itu adalah daerah jaringan-jaringan jalan yang dapat dibedakan atas :

- a. Jalan daerah yang ada di Kelurahan Peneki dapat menghubungkan Ibukota Kecamatan dengan desa-desa maupun desa dengan daerah lainnya.
- b. Jalanan desa dari pusat kecamatan ke masing-masing desa.

Pada umumnya jalan-jalan ini sudah dapat dilalui oleh mobil. Disamping itu pula telah diadakan rehabilitasi jalan di Kelurahan Peneki sepanjang 3,5 km, kemudian perlu juga dikemukakan keadaan jembatan di Kelurahan Peneki yang mana sebagai alat penghubung dari Ibukota kecamatan ke desa-desa bahkan ke daerah-daerah lainnya yaitu poros antara Wata Peneki dengan Desa Leweng satu buah jembatan dengan kapasitas 12 ton, antara Wata Peneki dengan Topai, dua buah jembatan dengan kapasitas 20 ton, antara Wata Peneki dengan desa Manyili terdapat sebuah jembatan dengan kapasitas 12 ton.

Dengan adanya perhubungan jalan serta rehabilitasi di Kelurahan Peneki seperti apa yang telah diuraikan terdahulu maka jalan-jalan dan jembatan tersebut perlu diperhatikan dan dipelihara dengan baik, oleh karena

keseluruhan usaha-usaha misalnya meningkatkan hasil produksi, pelaksanaan pembangunan, utamanya di daerah pedesaan itu baru akan berhasil apabila ditunjang dengan sarana perhubungan ini mulai dari desa sampai kota.

b. Pengangkutan (transport)

Setelah melihat betapa pentingnya komunikasi itu dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa sebagaimana dijelaskan terdahulu maka perlu adanya pengangkutan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa demi untuk membawa bahan-bahan yang dibutuhkan dalam suatu proyek pembangunan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian daripada itu kalau kita berhadapan dengan pengangkutan melalui darat, laut, udara.

Pengangkutan melalui darat di Kelurahan Peneki Kecamatan Takkalalla boleh dikatakan cukup lancar terutama pengangkutan dengan mobil, karena merupakan daerah petani.

Adapun keadaan kendaraan melui darat yang ada di Kelurahan Peneki dapat dibedakan atas :

- | | | |
|------------------|---|----------|
| a. Mobil Truk | : | 13 Buah |
| b. Mobil Pickup | : | 20 Buah |
| c. Sepeda Motor | : | 605 Buah |
| d. Dokar (bendi) | : | 24 Buah |

e. Sepeda (kereta angin) : 106 Buah

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci yang sangat menentukan menuju pada modernitas yang diusahakan dalam pembangunan. Karena dengan pendidikan dan Ilmu pengetahuan maka pertumbuhan dan kemajuan masyarakat telah meningkat. Untuk mencapai hal itu diperlukan sarana dan prasarana pendidikan agar berperan dalam merubah, menyebarkan ilmu pengetahuan dan lingkungannya, sedangkan dengan ilmu pengetahuan ini dapat diharapkan nilai-nilai baru atau ide-ide baru yang memungkinkan masyarakat untuk membangun dirinya dan lingkungan masyarakatnya.

Di samping itu merupakan juga faktor yang sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia pada umumnya, sebab hal ini dapat diketahui dari adanya sasaran yang ingin dicapai seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa inilah sehingga pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan selain dari pada itu, tidak dapat disangkal bahwa setelah kita membangun selama tiga Repelita telah banyak kemajuan yang dicapai dalam berbagai kehidupan/pembangunan selama ini, baik dibidang fisik

e. Sepeda (kereta angin) : 106 Buah

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci yang sangat menentukan menuju pada modernitas yang diusahakan dalam pembangunan. Karena dengan pendidikan dan Ilmu pengetahuan maka pertumbuhan dan kemajuan masyarakat telah meningkat. Untuk mencapai hal itu diperlukan sarana dan prasarana pendidikan agar berperan dalam merubah, menyebarkan ilmu pengetahuan dan lingkungannya, sedangkan dengan ilmu pengetahuan ini dapat diharapkan nilai-nilai baru atau ide-ide baru yang memungkinkan masyarakat untuk membangun dirinya dan lingkungan masyarakatnya.

Di samping itu merupakan juga faktor yang sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia pada umumnya, sebab hal ini dapat diketahui dari adanya sasaran yang ingin dicapai seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa inilah sehingga pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan selain dari pada itu, tidak dapat disangkal bahwa setelah kita membangun selama tiga Repelita telah banyak kemajuan yang dicapai dalam berbagai kehidupan/pembangunan selama ini, baik dibidang fisik

materil maupun non materil pembangunan tersebut harus secara terus menerus ditingkatkan sehingga tercapai wujud masyarakat yang dicita-citakan. Dalam hubungan inilah, maka untuk menjamin kesinambungan pembangunan yang semakin kompleks, baik kegiatannya maupun masalahnya, diperlukan manusia-manusia pembangunan yang mampu menempatkan diri dalam melaksanakan berbagai fungsi dalam pembangunan baik sebagai perencana, sebagai tenaga pelaksana, maupun fungsi lainnya dalam pembangunan. Untuk maksud ini pula sehingga diperlukan pendidikan sebagai wadah untuk menciptakan tenaga-tenaga terampil yang dapat menjamin daya guna maupun dan hasil guna pembangunan.

Karena adanya tuntutan dibidang pendidikan ini sehingga Repelita Pertama, pendidikan pula telah dijadikan salah satu sasaran pembangunan nasional. Hal ini terlihat dengan adanya kebijaksanaan pemerintah yang didasarkan atas Instruksi Presiden (Inpres), baik dalam pembangunan Sekolah Dasar (SD), pengangkatan tenaga-tenaga pengajar, Bujang Sekolah maupun penetapan secara merata keseluruh penjuru tanah air sampai di daerah pedesaan termasuk desa-desa dalam wilayah Daerah Tingkat II Wajo.

Usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini pendidikan juga telah didukung oleh

partisipasi masyarakat dalam swadayanya, sehingga dengan demikian telah banyak pula kemajuan yang dicapai antara lain tersedianya sekolah-sekolah dalam berbagai tingkatan termasuk juga di Kelurahan Peneki yang datanya seperti dalam tabel berikut ini :

TABEL II
JUMLAH PRASARANA SEKOLAH
DI KELURAHAN PENEKI TAHUN 1990-1991

No	Lingkungan	STK	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah
1.	Wata Peneki	1	1	1	-	-	3
2.	Sangkuru	1	1	-	-	-	2
3.	Topai	-	1	-	-	-	1
4.	Bocco	-	2	-	-	-	2
		2	5	1	-	-	8

Sumber : Kantor Kelurahan Peneki Tahun 1991.

Berdasarkan data yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa setiap lingkungan dalam Kelurahan Peneki telah terdapat sejumlah Sekolah yang merupakan sarana bagi penduduk untuk meningkatkan pengetahuan utamanya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan juga penduduk telah menggunakan fasilitas tersebut tabel berikut tentang jumlah penduduk yang sekolah sebagai berikut :

TABEL III
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK MASING-MASING
LINGKUNGAN DI KELURAHAN PENEKI TAHUN 1990-1991

No	Lingkungan	STK	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah
1.	Wata Peneki	21	461	981	38	7	645
2.	Sangkuru	11	310	36	9	2	368
3.	Topai	-	163	19	4	-	186
4.	Bocco	-	185	20	9	-	214
		32	1189	156	60	9	1013

Sumber : Kantor Kelurahan Peneki Tahun 1991.

Selanjutnya pengadaan guru tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan pendidikan disegala tingkatan maka keadaan guru di Kelurahan Peneki dapat dilihat dengan tabel dibawah ini :

TABEL IV
JUMLAH GURU DI KELURAHAN PENEKI

No	Lingkungan	STK	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah
1.	Wata Peneki	2	9	13	-	-	24
2.	Sangkuru	2	9	-	-	-	11
3.	Topai	-	7	-	-	-	7
4.	Bocco	-	11	-	-	-	11
		4	36	13	-	-	53

Sumber : Kantor Kelurahan Peneki Tahun 1991.



Berdasarkan data yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa di Kelurahan Peneki Kecamatan Takkalla terdapat sejumlah sekolah dan tenaga guru yang mana merupakan sarana bagi penduduk untuk meningkatkan pengetahuannya, yaitu utamanya dalam rangka mewujudkan aspirasi nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun salah satu hal yang perlu mendapat perhatian yaitu masih perlu pengadaan ruang belajar atau fasilitas sekolah dan tenaga guru baik tingkat TK, SD, SMTP, mengingat tingkat perkembangan penduduk di Kelurahan Peneki.

5. Agama

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertamanya "Ketuhanan Yang Maha Esa", maka dalam hubungan ini faktor agama merupakan faktor yang sangat penting dalam mengamalkan Pancasila yang juga sekaligus merupakan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Dikatakan demikian karena agama merupakan wadah bagi bangsa Indonesia untuk mengamalkan Pancasila yang juga menjadi sarana penunjang tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat bagi pemeluknya.

Jika hal ini dikatakan dengan agama yang dianut oleh penduduk Kelurahan Peneki, maka mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sedangkan yang lainnya beragama Kristen.

Untuk jelasnya mengenai hal tersebut penulis mengemukakan data tentang komposisi penduduk menurut agama di Kelurahan Peneki Kecamatan Takkalla sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL V
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT AGAMA
DI KELURAHAN PENEKI TAHUN 1991

No	Lingkungan	Jumlah Penganut (Jiwa)		Jumlah
		ISLAM	KRISTEN	
1.	Wata Peneki	1126	5	1131
2.	Sangkuru	1051	3	1054
3.	Topai	1020	-	1020
4.	Bocco	839	-	839
	Jumlah	4036	8	4044

Sumber : Kantor Kelurahan Peneki Tahun 1991.

Selain komposisi penduduk menurut agama, salah satu yang perlu pula dikemukakan di sini ialah jumlah tempat ibadah yang ada dalam wilayah Kelurahan Peneki yang merupakan wadah pelaksanaan ibadah menurut agama masing-masing, utamanya dalam bentuk berjamaah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perencanaan Pembangunan Desa di Kelurahan Peneki.

Kelurahan Peneki terdapat berbagai kelompok masyarakat yang saling berhubungan satu sama lain. Diantara kelompok-kelompok itu adalah aparat kelurahan Peneki, aparat Kecamatan Takkalalla, tokoh masyarakat, petani, pedagang, ABRI, Buruh dan lain-lain.

Kelurahan Peneki yang dalam hal ini adalah sebagai Ibukota Kecamatan Takkalalla dalam satu kesatuan masyarakat Kelurahan Peneki, memiliki peran serta dalam proses perencanaan pembangunan utamanya dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi. Peran serta yang dilakukan oleh pemerintah setempat berupa pelaksanaan, motivator, dan stabilisator.

Keterlibatan aktif masyarakat dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, paling sedikit suatu rencana harus peka terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga dengan demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Oleh karena keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tergantung pada keterlibatan aktif dari

melalui perwakilannya pada lembaga perencanaan desa selalu 83,4 % mengatakan selalu diikuti sertakan. Adapaun yang secara kadang-kadang mengikutinya hanyalah karena adanya halangan yang dialami pada saat kegiatan itu dilaksanakan.

- b. Keikutsertaan masyarakat dalam penentuan arah sampai pada tahap evaluasi pembangunan dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat ditingkat desa maupun melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di Kelurahan Peneki, guna menempuh berbagai kebijaksanaan dalam penentuan proyek-proyek pembangunan. Kegiatan inipula terlihat pada tabel berikut ini :

TABEL VIII

KEIKUTSERTAAN ANGGOTA LKMD DALAM PENENTUAN ARAH PEMBANGUNAN

NO	Responden	Jawaban			JML
		selalu ikut	kadang-kadang	tdk pernah	
1.	KETUA LKMD	1 (8,3)	-	-	1(8,3)
2.	Sekretaris LKMD	1 (8,3)	-	-	1(8,3)
3.	Anggota Masyarakat	2 (16,6)	8 (66,7)	-	10 (83,4)
		4 (34,3)	8 (66,7)	-	12(100)

Dari tabel ini nampak bahwa dalam hal penentuan arah pembangunan anggota masyarakat hanya kadang-kadang dilibatkan. Hal ini terlihat pada prosentase 16,6 % pernyataan anggota masyarakat yang menunjukkan selalu dilibatkan.

- c. Keikutsertaan masyarakat dalam memikul beban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan, seperti modal pembiayaan, kerjasama, meteril serta sumbangan pikiran dari anggota-anggota masyarakat.

TABEL IX
KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM MEMIKUL BEBAN
DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

NO	Responden	Jawaban			JML
		selalu ikut	kadang-kadang	tdk pernah	
1.	KETUA LKMD	1 (8,3)	-	-	1(8,3)
2.	Sekretaris LKMD	1 (8,3)	-	-	1(8,3)
3.	Anggota Masyarakat	10 (83,4)	-	-	10 (83,4)
		12 (100)	-	-	12(100)

Dari tabel inipun sudah terlihat bahwa pada akhirnya beban tanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan adalah menjadi beban tanggung jawab

dilaksanakan oleh LKMD, Kepala Kelurahan selalu mengajak pada pengurus LKMD untuk memberikan saran-saran/ pendapat-pendapat dan semacamnya dapat meupakan bahan pertimbangan yang akan dipecahkan bersama, sehingga dengan demikian Kepala Kelurahan selalu berusaha menggerakkan LKMD melaksanakan fungsi dengan sebaik-baiknya, hal ini jelas pula diketahui dari penjelasan pengurus LKMD di Kelurahan Peneki adalah sebagai Berikut :

TABEL X
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KETERBUKAAN KEPALA
KELURAHAN PENEKI MEMIMPIN LKMD

NO	KLASIFIKASI RESPONDEN	N	PENDAPAT RESPONDEN						JUMLAH	
			TERBUKA		AGAK TERTUTUP		TERTUTUP		FM	FN (%)
			FM	FN (%)	FM	FN (%)	FM	FN (%)		
1.	Aparat LKMD	2	2	100	-	-	-	-	2	100
2.	Aparat Lingkungan	4	4	100	-	-	-	-	4	100
3.	Aparat PKK	2	1	50	1	50	-	-	2	100
4.	Organisasi Pemuda	6	3	50	2	33,33	1	16,67	6	100
5.	Tokoh Masyarakat	20	13	65	4	20	3	15	20	100
J U M L A H		34	22	64,71	7	23,53	4	11,76	34	100

Hasil Wawancara dengan responden di Kelurahan Peneki

Catatan :

- Aparat LKMD : Ketua I
Sekretaris
- Aparat Lingkungan : Kepala Lingkungan Wata Peneki
Kepala Lingkungan Sangkuru
Kepala Lingkungan Topai
Kepala Lingkungan Bocco
- Aparat PKK : Ketua / Sekretaris
- Organisasi Pemuda : Ketua / Sekretaris

Dengan melihat tabel di atas, dimana 34 orang responden ternyata 22 orang (64,71 %) yang menyatakan bahwa Kepala Kelurahan Peneki terbuka untuk membicarakan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengajukan pendapatnya, 8 orang (23,53%) yang menyatakan agak tertutup dan 3 orang (11,76 %) yang menyatakan tertutup.

Berdasarkan tabel di atas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

"Kepala Kelurahan senantiasa menggerakkan dan mendorong serta memberikan rangsangan kepada pengurus LKMD untuk berpartisipasi dalam pembangunan pada umumnya dan rapat LKMD pada khususnya. Dan juga memberikan kesempatan para pengurus untuk mengemukakan pendapatnya sehingga keputusan yang diambil benar-benar didasarkan atas musyawarah".

Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan seluruh sektor pembangunan secara terpadu di Kelurahan Peneki terutama penanganan mekanisme perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah, diperlukan fungsi-fungsi korniasi, sinkronisasi, integrasi dari seluruh instansi.

Pengesahan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) oleh Kepala Kelurahan didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain :

- a. Menilai kebenaran dari usulan tersebut
- b. Mempertimbangkan DURP dengan potensi yang dimiliki oleh desa baik berupa sumber-sumber keuangan maupun tenaga kerja yang akan mengelolah.

Pembahasan DURP oleh Kepala Kelurahan Peneki ini dibicarakan dalam rapat LKMD yang ditanggapi serta dilengkapi berbagai informasi, yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Keputusan yang diambil dalam rapat tersebut merupakan keputusan pemerintah desa.

Daftar usulan Proyek yang menjadi keputusan dan untuk diserahkan kepada yang lebih tinggi meliputi berbagai rencana proyek dalam hal ini penulis akan memperlihatkan daftar usulan proyek di Kelurahan Peneki tahun anggaran 1991-1992 seperti terlihat dalam tabel berikut :

TABEL XI
 DAFTAR USULAN PROYEK-PROYEK
 DI KELURAHAN PENEKI TAHUN ANGGARAN 1991-1992

NO	Jenis Program	Sumber Biaya
1.	Pengerasan Jalan	Pemerintah
2.	Rehabilitasi Tempat Sosial	Swadaya
3.	Pengairan	Pemerintah
4.	Pembangunan SLTA	Pemerintah
5.	Pembangunan Perumahan Guru SMP	Pemerintah
6.	Tambahan Gedung sekolah SMP	Pemerintah
7.	Pembuatan badan jalan	Swadaya
8.	Duiker Sumur Umum/ Gotong Royong	Swadaya

Sumber diolah dari arsip Kelurahan Peneki Tahun 1991-1992

Berdasarkan tabel di atas bahwa daftar usulan rencana proyek yang merupakan keputusan desa tahun anggaran 1990-1991 disusun berdasarkan prioritas kepentingan.

Usulan proyek tersebut seluruhnya membutuhkan biaya sebesar untuk 8 jenis proyek yaitu pengerasan jalan sepanjang 350 meter, rehabilitasi tempat-tempat sosial meliputi mesjid, sekolah taman kanak-kanak, rehabilitasi gedung olah raga/ lapangan murni, pembangunan pagar kantor Kelurahan, balai pertemuan masyarakat, rehabilitasi rumah sakit umum, pembangunan pintu air.

Dari keputusan tersebut dapat kita lihat bahwa dalam proses perencanaan di Kelurahan Peneki telah dibicarakan dalam musyawarah tertinggi di tingkat desa, dalam perencanaan itu pula telah dibicarakan besarnya biaya yang diperlukan dan sumbernya untuk setiap jenis program, dan juga mengenai strategi pelaksanaannya, berapa lama waktu yang diperlukan serta perkiraan mengenai kesulitan-kesulitan yang mungkin dapat timbul dan juga mengatasinya.

Selanjutnya setelah prosedur perencanaan telah dilaksanakan maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan rehabilitasi daripada perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, namun dalam pelaksanaan itu rencana yang telah disusun sebelumnya harus dijabarkan di dalam bentuk program.

Pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Peneki yang berupa Inpres, pengaturannya diserahkan kepada LKMD untuk dilaksanakan dalam arti mengusahakan tenaga-tenaga buruh yang berasal dari dalam desa sendiri, dengan demikian dapat menambah lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Jenis-jenis proyek yang dilaksanakan seperti yang tercantum dalam DURP dan telah disampaikan ke atas tetapi yang menjadi kenyataan bahwa tidak seluruhnya DURP

tersebut diberikan kepada desa untuk satu tahun anggaran.

Di dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa dimana dibicarakan dalam suatu musyawarah desa yang melibatkan sejumlah unsur untuk melengkapi dan memberikan saran menuju kepada kesempurnaan, oleh karena itu banyak pengalaman menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sering mengalami kegagalan oleh karena perencanaan menyusun program yang sering tidak sesuai dengan potensi desa yang bersangkutan.

Keberhasilan dalam hal ini dapat dicapai dengan mendasar pada pembinaan/bimbingan, dari direktorat pembangunan desa yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian yang seksama mengenai kedudukan daerah pedesaan dalam rangka pembangunan desa.
2. Meningkatkan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa kearah peningkatan Produktifitas.
3. Mengadakan pemupukan permodalan masyarakat desa kearah peningkatan termasuk Menstimulir perkreditan desa.
4. Meningkatkan usaha gotong royong dan swadaya masyarakat dengan bantuan moril kepada desa.
5. Mengaktifkan struktur Pemerintahan desa disertai dengan sinkronisasi lembaga-lembaga desa.

Berdasarkan tugas tersebut diatas berarti desa cukup mempunyai peluang besar untuk lebih berkembang kearah

yang lebih baik, hal ini disebabkan karena bantuan materil maupun pembinaan yang dapat memanfaatkan partisipasi dan swadaya masyarakat desa.

Maka untuk lebih jelasnya tentang mekanisme perencanaan dalam rangka pembangunan pedesaan baik dananya yang bersumber dari APBN, APBD maupun swadaya masyarakat kelurahan Peneki, maka penulis akan menggambarkan secara mendetail tentang yang terlibat dalam penerapan perencanaan dalam rangka pembangunan pedesaan.

Anggota masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa di Kelurahan Peneki ditetapkan sebagai berikut :

I. Kepala Kelurahan dan Stafnya :

- A. Syamsu Alam .,BA : Kepala Kelurahan
- M. Saad Batong : Sekretaris
- Mahmud Aslam : Kaur Kesra
- Rosmiaty : Pemerintahan
- Rostam M : Pembangunan
- Andi Abusar : Ka. Lingkungan Wata Peneki
- Syarifuddin : Ka. Lingkungan Sangkuru
- Nurung T : Ka. Lingkungan Topai
- Andi Pallawa Gau : Ka. Lingkungan Bocco

- Masyarakat banyak yang merupakan tenaga gotong royong dalam rangka pembangunan Desa di Kelurahan Peneki.

C. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Desa.

Sebelum melangkah lebih jauh untuk menambah pelaksanaan pembangunan desa di Kelurahan Peneki, maka terlebih dahulu akan dikemukakan tujuan dan sasaran pembangunan.

Tujuan pembangunan nasional, sebagaimana dirumuskan dalam GBHN antara lain :

1. Mewujudkan suatu adil dan makmur, yang merata dan sprituil berdasarkan Pancasila.
2. Di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, yang merdeka, berdaulat, bersatu berkedaulatan rakyat.
3. Dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis.
4. Dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan aman.

Dengan demikian setiap usaha pembangunan termasuk usaha pembangunan desa harus bertitik tolak pada tujuan pembangunan tersebut, masalahnya hanya berpangkal dari tujuan tersebut maka untuk ruang lingkup masyarakat desa yang ingin dicapai adalah :

1. Bagaimana desa sebagai bagian masyarakat Indonesia mencapai tingkat adil dan makmur.
2. Keadilan dan kemakmuran desa meliputi bidang materil dan sprituil.
3. Kesadaran bahwa desa merupakan bagian dari negara

kesatuan Republik Indonesia.

4. Pandangan hidup di desa harus berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Kalau kita melihat pentingnya pembangunan pedesaan maka sebenarnya mempunyai sasaran yaitu :

- a. Prasarana produksi desa.
- b. Prasarana perhubungan desa.
- c. Prasarana pemasaran desa.
- d. Prasarana sosial desa.

Kesemuanya ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Mendorong/menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat pembangunan desa.
2. Mengfungsikan secara aktif lembaga-lembaga desa (LKMD, LMD, PKK).
3. Menumbuhkan, mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat untuk menunjang upaya pencapaian swasembada pangan serta mengatasi kelangkaan permodalan di desa.
4. Meningkatkan pertumbuhan usaha-usaha ekonomi pedesaan kearah kehidupan berkoperasi dalam meningkatkan pendapatan serta memperluas kesempatan kerja.

Dengan melihat tujuan tersebut diatas maka tujuan pembangunan desa pada hakekatnya dapat dibagi atas dua

bahagian yaitu :

a. Tujuan jangka pendek

Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di desa-desa yang berarti menciptakan situasi dan kondisi kekuatan dan kemampuan desa dan masyarakat dalam suatu tingkat yang lebih kuat atau lebih nyata untuk tahap-tahap selanjutnya.

b. Tujuan jangka panjang

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa dalam hubungan dengan sarana antara pembangunan masyarakat desa yang ditujukan untuk menaikkan produksi yang potensial yang dimiliki oleh desa meningkatkan kesejahteraan dalam rangka pembangunan ekonomi.

Kegiatan dan tindakan lebih intensif dan terarah daripada pembangunan masyarakat sebagai tersebut diatas mewujudkan pula ekonomi riil yang bebas dari segala penghidupan dan kakan menentukan suksesnya pembangunan nasional.

Melihat ketentuan tersebut diatas maka pembangunan merupakan salah satu penyelesaian daripada cita-cita bangsa Indonesia dan oleh sebab itu harus dilaksanakan secara massal dan integral. Pembangunan diselenggarakan secara massal artinya merata seluruh daerah atau Wilayah Republik Indonesia akan dilaksanakan oleh rakyat sedangkan pelaksanaannya secara integral dimaksudkan bahwa pembangunan desa itu mencakup segala segi kehidupan masyarakat desa baik jasmani maupun rohani, dan juga dalam pelaksanaan itu diperlukan tenaga-tenaga berpengalaman, pengorganisasiannya yang baik serta pimpinan yang cakap dan disiplin.

Mengingat bahwa rencana dan pelaksanaan pembangunan itu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan dewasa



ini serta keadaan desa ataupun daerah maka perlu adanya prioritas yang kongkrit. Jadi pembangunan masyarakat desa bertujuan untuk mempertinggi pengahasilan dan daya beli masyarakat, khususnya rakyat yang berdiam di daerah-daerah pedesaan. Pelaksanaan pembangunan masyarakat desa ini pada prinsipnya didasarkan swadaya dan gotong royong serta partisipasi masyarakat yang pada hakekatnya bersumber dari inisiatif. Kemauan serta aktifitas dari rakyat itu sendiri. Oleh karena tanpa adanya swadaya dan gotong royong maka pembangunan masyarakat desa diwilayah tersebut tak dapat dikatakan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Sasaran Pokok Pembangunan Masyarakat Desa.

Sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat desa telah dikemukakan diatas dan sasarannya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dimana pokok pelaksanaannya dilakukan oleh Bangdes kabupaten dan kepala kecamatan sebagai koordinator pembangunan diwilayahnya, serta kepala Desa/Kelurahan sebagai koordinator pembangunan didesanya. Maka penulis dapat memberikan gambaran tentang sasaran pokok pelaksanaan pembangunan masyarakat meliputi beberapa prasarana desa yang dianggap mencakup beberapa aspek pembangunan.

a. Prasarana Produksi Desa.

Hal ini meliputi beberapa aspek dalam peningkatan

dan pengadaan prasarana-prasarana produksi desa dalam rangka peningkatan income perkapita riil dari pada masyarakat desa seperti :

- Perkebunan.
- Perikanan.
- Peternak.

b. Prasarana Perhubungan.

Meningkatkan prasarana perhubungan desa sehingga desa berada dalam orbit perkembangan daerah seperti :

- Jalan - jalan desa.
- Jembatan - jembatan desa.
- Peningkatan jumlah kendaraan.

c. Prasarana Pemasaran Desa.

Meliputi hal-hal yang bertujuan meningkatkan Prasarana pemasaran desa yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa seperti :

- Pasar umum.
- Pasar ikan.
- Pasar hewan.
- Lumbung desa.

d. Prasarana sosial desa.

Meningkatkan prasarana sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa seperti :

- Tempat Ibadah.
- Balai desa.

- Sumur umum.
- Balai pengobatan.

Sasaran pokok Pembangunan masyarakat desa diwilayah Kelurahan Peneki Kecamatan Takkalalla Kabupaten Daerah tingkat II Wajo tidak semuanya diprioritaskan pada skala prioritas akan tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah setempat dan meliputi parasarana - prasarana seperti prasarana produksi, prasarana pemasaran, prasarana perhubungan, prasarana sosial.

D. Faktor - Faktor Yang Menghambat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Peneki Kecamatan Takkalalla.

Dalam usaha pengembangan desa di kelurahan Peneki ada beberapa hal yang dianggap menghambat seperti :

1. Iklim.

Iklim merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap perencanaan pembangunan. Bilamana bertepatan dengan musim hujan sehingga pembuatan jalan yang menghubungkan dusun satu dengan dusun yang lainnya atau desa dengan desa yang lain terputus dan terhenti dikerjakan mengingat kondisi jalan tidak memenuhi persyaratan untuk dijalani, sehingga kadang kala waktu atau target dari pelaksanaan pembangunan tersebut tidak sesuai lagi dengan rencana sebelumnya.

2. Spekulasi Nilai Tanah.

Usaha pengembangan desa di kelurahan Peneki

khususnya dalam hal pengembangan fisik desa. Salah satu yang menjadi faktor penghambat adalah spekulasi nilai tanah terhadap rencana kegiatan pembangunan yang telah ditentukan lokasinya. Maksud spekulasi tanah disini adalah menghalang-halangi pihak pemerintah untuk membangun diatas tanah dengan prasangka tanah tersebut dianggap milik pribadinya dengan harapan si penjual tanah bukan miliknya.

Dengan terjadinya spekulasi nilai tanah terlokasi pembangunan sarana desa, kadang kala program pemerintah atau pelaksana pembangunan yang telah ditentukan lokasinya terpaksa ditunda bahkan kadang kala dibatalkan, bilaman spekulasi nilai tanah tersebut sedemikian besarnya.

Demikian masalah spekulasi nilai tanah ini dirasakan oleh pemerintah di Kelurahan Peneki sebagai suatu masalah yang menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya dalam pengembangan fisik desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Akhirnya berdasarkan pada uraian dalam bab terdahulu maka kini tibalah penulis pada bab penutup dari skripsi, dimana penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembangunan desa di Kelurahan Peneki ternyata mendapat dukungan dari masyarakat dalam arti bahwa masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan mulai dari proses permulaan pelaksanaan, sampai kepada pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai namun tak dapat disangka bahwa di samping keberhasilan itu terdapat pula hambatan-hambatan dalam pelaksanaan proyek pembangunan desa tersebut.
2. Mengingat pengembangan fisik Desa / Kelurahan banyak berkaitan dengan penggunaan tanah, maka hendaknya pemerintah wilayah Kecamatan Takkalalla bekerja sama dengan instansi terkait misalnya bidang agraria agar lebih meningkatkan kesadaran warga desa baik melalui penyuluhan hukum maupun pendekatan secara manusiawi (kekeluargaan), agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan masalah spekulasi nilai tanah dapat ditelan, hal ini penting artinya karena pada kenyataannya tanah atau lahan di Kelurahan Peneki Kecamatan Takkalalla. sebagian besar merupakan tanah milik perorangan.

3. Didalam hal ini perencanaan cukup memegang peranan yang penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang sementara digalakkan di Kelurahan Peneki Kecamatan Takkalalla Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo.
4. Masih kurang tenaga ahli/trampil dalam bidang perencanaan dalam rangka pembangunan desa dalam lingkungan Kelurahan Peneki.
5. Belum ada pembagian tugas yang jelas diantara anggota-anggota badan perencanaan dalam segala hal utamanya dalam pembangunan desa disegala bidang sebab badan perencana (LKMD) dalam lingkungan Kelurahan Peneki terdiri banyak personil yang terdapat didalamnya.
6. Didalam perencanaan yang baik maka mengakibatkan pelaksanaan Pembangunan lebih murah dan teratur dan dapat lebih baik dalam menunjang keberhasilan dalam lingkungan pembangunan diwilayahnya.
7. Dengan mekanisme perencanaan yang teratur maka memungkinkan pelaksanaan pembangunan pedesaan dapat terlaksana dengan baik.

B. SARAN-SARAN

1. Oleh karena kesadaran masyarakat dalam rangka pembangunan masyarakat masih rendah, maka disarankan agar pejabat pemerintah dapat memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat desa, demikian pula peranan masyarakat dalam

pembangunan bersama pimpinan Wilayah Kecamatan pada umumnya, dan Kelurahan Peneki pada khususnya dapat membuat program pembangunan desa secara berencana terhadap pelaksanaan pembangunan dipedesaan.

2. Dalam pelaksanaan pembangunan sekarang ini, agar kader-kader pembangunan masyarakat desa yang telah memperoleh pendidikan hendaknya dimanfaatkan didesanya masing-masing.
3. Sasaran pembangunan masyarakat desa dimana diharapkan pemerintah memberi perhatian dan meningkatkan usaha-usaha pembangunan sosial fisik pedesaan.
4. Perencanaan ditingkat desa adalah memegang peranan penting, untuk itu pihak pemerintah Daerah/Kecamatan perlu memperhatikan tindakan kepala Kelurahan/Desa yang dalam hal ini merupakan motor penggerak dalam pembangunan desanya utamanya Kelurahan Peneki sebab inilah yang memegang pucuk pimpinan didaerahnya masing-masing.
5. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto, R., Prof. Drs. Buku Penuntun Geografi Sosial, Yogyakarta : Penerbit UP Spring 1968.
- Hagul, Peter, Ed., Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Jakarta : Penerbit CV Rajawali, Cet. I, 1985.
- Kuntjoroningrat, Metode -Metode Penelitian Masyarakat, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.
- Manullang., Drs, Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Penerbit, PT Pembangunan Gunung Sahari, 1973.
- Mubyarto, Pembangunan Manusia Indonesia, Prisma, Januari 1983 No.1, Jakarta : Penerbit LP3ES, 1983.
- Saleh, K. Wantjik, SH. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975 Tentang Pemerintahan Desa, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1982.
- Siagian, SP, DR., MPA, Administrasi Pembangunan, Jakarta Penerbit PT. Gunung Agung, Ct. X, 1983.
- Suroyo, BE, Pembangunan Pemukiman di Pedesaan, BIC Newsletter, No. 2 Tahun IV Feb 1975, Ujung Pandang : Pusat Informasi Teknik Pembangunan DITJEN Cipta Karya Dep. PUTL, 1975.
- Suryaningrat, Bayu, Drs., Organisasi Pemerintahan Wilayah/ Daerah, Jakarta : Pen Aksara Baru, Cet. I 1985.
- Suwignjo, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Jakarta : Pen: Ghalia Indonesia 1985.
- Soeparno, Mengenai Desa, Gerak dan Penjelolaannya, Intermedia, Jakarta, 1977.

Tjokroamidjojo Bintoro MA, *Perencanaan Pembangunan*,
Penerbit, PT. Gunung Agung Jakarta,
1981.

_____, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*
Penerbit PT. Gunung Agung Jakarta
1983.

_____, *Pengantar Administrasi Pembangunan*,
Penerbit LP3ES, Jakarta, Cetakan ke
IV Tahun 1976.

